

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya lembaga keuangan syariah diawali dengan lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang lembaga keuangan syariah yang kemudian diikuti oleh antusias masyarakat yang sangat besar untuk memanfaatkan jasa di lembaga keuangan syariah. Dengan harapan lembaga keuangan syariah dapat membawa perekonomian makro dan mikro menjadi lebih baik terutama dapat lebih menyentuh perekonomian mikro. Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang memiliki prinsip berlandaskan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan operasional dan pengadaan produk-produknya. Dalam arti perbankan syariah memberikan layanan jasa dan penyediaan produk-produk untuk lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pelaksanaannya berlandaskan prinsip syariat Islam. Dengan begitu lembaga keuangan syariah perlu melakukan pertanggungjawaban terhadap kegiatan operasional yang telah terjadi kepada Allah SWT. Maka tujuan akuntansi syariah tidak hanya sebatas oleh pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada manusia saja tetapi juga kepada Allah SWT. Perbankan syariah merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan operasional dengan tidak menggunakan bunga. Pertumbuhan perbankan syariah menjadi semakin pesat dan hal ini tidak bisa dihindarkan. Hal ini juga memberikan dampak pada perbankan syariah. Tingginya motivasi perbankan syariah merupakan salah satu dampak positif,

sedangkan hal ini juga memberikan dampak negatif yaitu kegagalan perbankan syariah dalam persaingan memberikan hambatan terhadap laju perbankan itu sendiri.

Tumbuhnya Bank Umum Syariah di Indonesia mulai dapat menyentuh perekonomian dalam sektor makro, akan tetapi Bank Umum Syariah dirasa belum dapat menyentuh sektor mikro dengan baik. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah celah untuk dapat menumbuhkan lembaga keuangan syariah yang dapat lebih menyentuh perekonomian mikro. Maka munculah Bank Perkreditan Rakyat yang berlandaskan prinsip syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan (Soemitra, 2009:46).

Bersamaan dengan pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kini mulai menyentuh sektor perekonomian mikro. Berdasarkan berita [www.bprsyariah.com](http://www.bprsyariah.com) BPRS di Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 31%. Pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami pertumbuhan aset 37%. Pada tahun 2012 di DIY sendiri mengalami pertumbuhan aset sebesar 20% dengan total aset Rp.241,8 miliar per Februari 2013. Untuk Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan hingga 52% yang mayoritas adalah dana deposito yang berjumlah Rp. 134,1 miliar.

Kemudian berdasarkan berita yang dimuat oleh Sindonews pada 4 Februari 2017 masyarakat Yogyakarta cenderung lebih memilih BPRS dari pada konvensional. Hal tersebut dapat kita lihat pada pertumbuhan kredit BPR Konvensional pada tahun 2016 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 8,81% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu BPRS mengalami peningkatan sebesar 14,3% selama periode Januari-Desember 2016 atas pembiayaan yang mereka keluarkan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan BPRS di DIY terus mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Dengan semakin banyaknya lembaga perbankan syariah yang tumbuh tentunya masing-masing lembaga perlu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar terus dapat bersaing ditengah pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat. Terutama untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu adanya penilaian agar terus dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan. Untuk meningkatkan kinerja keuangan BPRS bisa dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dengan meningkatnya kinerja keuangan BPRS tentunya dapat menjaga kepercayaan para nasabah untuk terus dapat menggunakan jasa BPRS. Untuk itu BPRS perlu melakukan pengelolaan dana yang baik agar dapat sesuai dengan prinsip utamanya. Pengelolaan dana yang baik tentunya akan memberikan bagi hasil yang maksimal kepada nasabah. Salah satu indikator penentu kondisi keuangan yang baik adalah kinerja keuangan perusahaan

tersebut. Kinerja keuangan yang semakin baik maka akan berdampak semakin baik pula pada kondisi keuangan BPRS.

Kinerja keuangan sebuah BPRS akan sangat mempengaruhi visi dan misi BPRS tersebut. Maka dari itu penilaian terhadap kinerja keuangan akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi BPRS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam periode tertentu. Untuk mengukur kinerja sebuah BPRS dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPRS. Laporan keuangan adalah sarana perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan operasional yang dijalankan oleh manajer terhadap sumber daya pemilik. Laporan laba rugi adalah laporan yang termasuk dalam laporan yang digunakan sebagai parameter penilaian terhadap kinerja perbankan syariah. Perbankan syariah yang memiliki tata kelola yang baik seharusnya menyajikan laporan keuangan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas akan memberikan informasi dan pengungkapan terhadap aktivitas operasional kepada pihak yang berkepentingan karena akuntabilitas sendiri adalah suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hasil laporan keuangan berupa keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi itu sendiri. Laporan keuangan seharusnya dapat menjadi sarana dalam memberikan informasi untuk pemenuhan hak pihak yang berkepentingan.

Untuk menilai tingkat profitabilitas BPRS menggunakan beberapa rasio yaitu ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), Rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif dan BOPO.

Hasil penilaian tersebut dapat pula menentukan prestasi dari sebuah BPRS. Rasio keuangan tersebut sangat penting untuk digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan sebuah BPRS atau perusahaan. Semakin tinggi tingkat rasio yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan juga akan semakin baik. Begitu juga sebaliknya apabila rasio keuangan perusahaan rendah maka kinerja keuangan perusahaan tersebut juga semakin buruk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya laporan keuangan dapat digunakan dan menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan neraca dan laporan laba rugi. Akan tetapi laporan laba rugi dan neraca hanya dapat mementingkan kepentingan *direct stakeholders* saja dan mengesampingkan kepentingan pihak lain seperti masyarakat, karyawan, dan pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 laporan keuangan perbankan syariah hampir sama dengan laporan keuangan perbankan konvensional hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu dengan menambahkan beberapa laporan, yaitu Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Qardul Hasan.

Maka untuk memenuhi akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan *indirect stakeholders* serta kepada Allah SWT terhadap laporan keuangan syariah berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Nadya Chaerunnisa disebutkan oleh pakar akuntansi syariah yaitu Baydoun dan Willet menganjurkan untuk menggunakan *Shari'ate Value Added Statement (SVAS)* yaitu sebagai laporan nilai tambah dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Laporan tersebut menekankan pada prinsip *full disclosure*. *Full disclosure* adalah bentuk kepedulian pihak manajemen kepada kegiatan yang sedang dijalankan melalui kegiatan bisnis terhadap pihak yang bekerja didalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka melalui konsep ini dianggap dapat merubah peran dari laporan laba rugi. Karena nilai tambah syariah juga termasuk nilai tambah ekonomi, mental, dan spiritual yang didapat dari proses yang halal. Konsep nilai tambah syariah ini juga tidak hanya mementingkan pada ekuitas atau modal saja, tetapi juga mementingkan semua stakeholders seperti yang diusulkan oleh konsep *Shari'ah Enterprise Theory* (SET). Dengan adanya konsep tersebut pengembangan teori akuntansi memberikan pengakuan pendapatan yang awalnya berupa laba berubah menjadi bentuk nilai tambah. *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) juga di usulkan oleh Baydoun dan Willet. Konsep tersebut mempunyai cakupan akuntabilitas yang lebih luas dari pada konsep *Entity Theory*. Akuntabilitas yang terdapat didalam konsep SET merupakan akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Akuntabilitas tersebut bertujuan sebagai pengikat agar akuntansi syariah selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang menumbuhkan kesadaran terhadap Tuhan.

*Shari'ah Enterprise Theory* (SET) sendiri tumbuh atas metafora zakat. Zakat adalah salah satu bentuk keseimbangan antara dunia dan akhirat. Konsep SET mempunyai tiga *stakeholders* yaitu Tuhan sebagai pusat dari seluruh alam semesta, manusia sebagai wakil di muka bumi yang diciptakan oleh Tuhan, dan alam sebagai pihak yang memberi kontribusi terhadap hidup matinya perusahaan seperti Tuhan dan manusia. Penggunaan SET sendiri memberikan

dampak terhadap pencatatan transaksi serta akuntabilitas laporan yang memiliki keseimbangan akuntabilitas sosial, finansial, dan lingkungan, serta materi, batin, dan spiritual yang memenuhi prinsip halal, thoyib, serta bebas dari riba.

Dengan menggunakan konsep *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS) memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang sebenarnya nilai pada perbankan syariah serta terkait kerjasama yang terjadi didalamnya. Pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang islami, laporan SVAS digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pada lembaga keuangan syariah yang mana tidak cukup hanya menggunakan Neraca dan Laporan Laba Rugi saja. Maka perlu adanya penambahan laporan nilai tambah syariah atau SVAS agar dapat mengetahui secara riil atas kinerja keuangan yang telah dihasilkan.

Untuk mempermudah proses pertimbangan dalam mengevaluasi posisi keuangan serta hasil operasi perbankan syariah, maka penelitian ini menggunakan rasio keuangan ROA, ROE, LBAP, dan BOPO dengan tujuan untuk menetapkan estimasi serta prediksi yang dapat mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rasio keuangan ROA, ROE, LBAP, dan BOPO karena di dalam laporan nilai tambah syariah memiliki aspek revaluasi komponen laporan nilai tambah syariah yang mana perlu diukur dengan menggunakan rasio ROA, ROE, dan LBAP. Dengan melakukan revaluasi tersebut maka dapat mempengaruhi nilai dari aktiva dan total nilai tambah yang berasal dari nilai tambah bersih yang ada pada laporan

nilai tambah syariah. Oleh karena itu perlu adanya rasio yang tepat untuk menggambarkan kinerja keuangan dari laporan nilai tambah syariah. Sedangkan rasio BOPO digunakan sebagai pengukur dari perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Pada laporan nilai tambah syariah laba bersih yang digunakan untuk input masukan dalam perhitungan total nilai tambah yang ada. Maka peneliti menilai rasio ROA, ROE, LBAP, dan BOPO dirasa tepat digunakan untuk laporan laba rugi maupun laporan nilai tambah syariah.

Penelitian ini juga memilih objek penelitian BPRS yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta karena BPRS di DIY mengalami pertumbuhan yang pesat pada tiap tahunnya. Penelitian ini juga menggunakan tahun 2014 – 2016 atas beberapa pertimbangan serta agar dapat menggambarkan kondisi BPRS terbaru. Pemilihan tahun 2014 – 2016 karena pertumbuhan BPRS di DIY dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Serta dalam kurun waktu tersebut BPRS sudah mulai mengeluarkan laporan tahunan secara berkala pada tiap tahunnya hingga saat ini BPRS di DIY terus mengalami perkembangan dan mulai melakukan pelaporan tahunan secara berkala.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memilih objek penelitian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DIY yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PENDEKATAN LAPORAN LABA



RUGI DAN *SHARI'ATE VALUE ADDED STATEMENT* (SVAS) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2014-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas penulis menentukan pokok masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DIY apabila menggunakan metode pendekatan Laba Rugi dan *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS) ?
2. Apakah kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di DIY memiliki perbedaan signifikan apabila menggunakan metode pendekatan Laba Rugi dan *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari pokok-pokok rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana kinerja keuangan dan menjelaskan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan pendekatan Laba Rugi dan *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS).
2. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan dan menjelaskan perbedaan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan pendekatan Laba Rugi dan *Shari'ate Value Added Statement* (SVAS).

#### D. Manfaat Penelitian

Hal penting dalam sebuah penelitian adalah manfaat yang diberikan dari hasil penelitian itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Untuk peneliti, penelitian ini dapat memperbanyak ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti. Seperti adanya laporan nilai tambah syariah atau SVAS.
2. Untuk BPRS yang bersangkutan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pentingnya menambahkan laporan SVAS.
3. Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai penambah referensi dalam penyusunan penelitian sebagai informasi untuk mengetahui kinerja keuangan BPRS.